



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PERHUBUNGAN KOTA **DUMAI TAHUN 2024**





DAFTAR ISI

HALAMAN J	UDUL	
DAFTAR ISI.		ii
DAFTAR LAI	MPIRAN	ii
DAFTAR TAI	BEL	iv
DAFTAR GA	MBAR	٧
KATA PENG	ANTAR	vi
RINGKASAN	I EKSEKUTIF	Vii
BAB I PENI	DAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Isu Strategis	5
1.5	Cascading Kinerja	6
1.6	Peta Proses Bisnis	7
1.7	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	7
BAB II PERI	ENCANAAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN	
2.1	Rencana Strategis	9
2.2	Tujuan dan Sasaran	10
2.3	Kebijakan, Strategi dan Program	12
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
BAB III AKU	NTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN	
A.	Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai	16
3.1	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	18
3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu	
	dan Beberapa Tahun Terakhir	21
3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra	26
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	29
3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau	
	Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi	29
3.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	
	ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	34
3.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
3.8	Prestasi dan Penghargaan	40
B.	Realisasi Anggaran	40
BABIV PENU	JTUP	
A.	Kesimpulan	44
R	Langkah Perhaikan/Saran	45

DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN KINERJA (LKIP) DINAS PERHUBUNGAN

- 1. Matrik Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026
- 2. Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Dumai
- 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta lampiran
- 4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta Lampiran Perubahan
- 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- 6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024	Χİ
Tabel 2	Program Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024	xi
Tabel 3	Perubahan Program Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai	xii
Tabel 4	Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024	xii
Tabel 5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai	
	Tahun 2024	xiv
Tabel 6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Dumai	
	Tahun 2024	XV
Tabel I. 1	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	8
Tabel II. 1	Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas	
	Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026	12
Tabel II. 2	Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024.	13
Tabel II. 3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan	
	Kota Dumai Tahun 2024	14
Tabel II. 4	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024	14
Tabel II. 5	Program Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai	15
Tabel II. 6	Program Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Dumai	15
Tabel III. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	17
Tabel III. 2	Atribut Capaian Indikator Kinerja	18
Tabel III. 3	Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran dan IKU Tahun 2024	19
Tabel III. 4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan	
	Beberapa Tahun Terakhir	22
Tabel III. 5	Perbandingan Realisasi sampai dengan Akhir Periode Renstra	27
Tabel III. 6	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	29
Tabel III. 7	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun	
	kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	34
Tabel III. 8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
Tabel III. 9	Prestasi dan Penghargaan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024	40
Tabel III.10	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2024	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai	4
Gambar I. 2	Cascading Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai	6
Gambar I. 3	Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kota Dumai	7
Gambar II. 1	Misi ke - 3 Kota Dumai	10
Gambar III. 1	Dokumentasi Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun	
	2024	36
Gambar III. 2	Dokumentasi Peresmian Pos Retribusi Pembantu Syech Umar	37
Gambar III. 3	Dokumentasi Pengadaan /Penyediaan Perlengkapan Jalan di	
	Kota Dumai Tahun 2024	38

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik..

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai ini merupakan mempertanggungjawabkan keberhasilan perwujudan dalam dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 2014 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun tentang berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang perhubungan efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Perhubungan

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Perhubungan Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Dumai, 9 Januari 2025

MTA KEPALA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

SAID EFFENDI, SE., M.M. Pembina Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas membantu Walikota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, maka sebagai unsur teknis, Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kota Dumai menjalankan fungsi:

- Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- 5. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan

6. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Perhubungan Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 3 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 yaitu "Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas" dan SASARAN yang ke 1 yang merupakan Tujuan Srategis Organisasi yaitu "Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan"

Secara umum Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Dumai 2021 - 2026 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 - 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 2 (dua) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024 antara lain:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
 Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - 2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
 - 6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk
 Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)
 Kabupaten/Kota

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai pada Tahun 2024 mengalami 1 kali perubahan seiring Perubahan Anggaran 2024 yakni sebagai berikut:

Tabel I Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai pada Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Terselenggaranya Lalu	Persentase Prasarana Transportasi	67%
	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Indikator keberhasilan yaitu persentase penyediaan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	68%
1		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	70%
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km : 94.117 unit

Sumber data : Perjanjian Kinerja Dishub Kota Dumai, 2024

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 81.768.809.720 (*Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*) untuk melaksanakan 2 (dua) Program Kerja antara lain :

Tabel 2 Program kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai

No.	Program		Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	26.302.695.476,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	55.466.114.244,-	APBD
	J UM L A H	Rp	81.768.809.720,-	APBD

Sumber data: DPA Murni Dishub Kota Dumai, 2024

Seiring dengan Perubahan Anggaran pada APBD Kota Dumai Tahun 2024, maka pada September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Perubahan Program kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai

No.	Program		Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	32.402.368.156,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	78.044.230.244,-	APBD
	J UM L A H	Rp	110.446.597.400,-	APBD

Sumber data: DPPA Dishub Kota Dumai, 2024

Dinas Perhubungan Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
	Tujuan : Meningkatkan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	68.5%	77.5%	113%	√			
	Pelayanan Infrastruktur Bidang	Persentase Prasarana Transportasi	67%	67%	100%	~			
	Perhubungan 1. Sasaran: Terselenggar anya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	68%	63%	93%	√			
1.		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	70%	88%	126%	√			
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km : 94.117 unit	1.198,23 km : 96.069 unit	98%	~			

Sumber data: Dishub Kota Dumai, 2024

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori 1 (satu) yaitu SANGAT BERHASIL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Kota Dumai pada tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 110.446.597.400,00 (Seratus Sepuluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA **OPERASI** Rp 63.366.286.151,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp 47.080.311.249,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)

Belanja Operasi : Rp 63.366.286.151,00
 Belanja Modal : Rp 47.080.311.249,00
 J u m l a h : Rp 110.446.597.400,00

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024

TUJUAN/			KINERJA			ANGGARAN	
SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan: Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	68.5%	77.5%	113%			
	Persentase Prasarana Transportasi	67%	67%	100%			
Sasaran: Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	68%	63%	93%			
	Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	70%	88%	126%			
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km: 94.117 unit	1.198,23 km : 96.069 unit	98%			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	100%	100%	100%	32.402.367.156,00	27.512.761.078	84,91%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	95%	100%	105%	78.044.230.244,00	54.514.195.421,38	69,85%

Sumber data: Dishub Kota Dumai Tahun 2024

Sebagaimana uraian tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)		igkat siensi	Keterangan
1	2	3	4	5		6	7
	Tujuan : Meningkatkan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	113%	99.55%	1,14	Efisien	-
	Pelayanan Infrastruktur Bidang	Persentase Prasarana Transportasi	100%	99,19	1,01	Efisien	-
1.	Sasaran : Terselenggara nya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	93%	87,16	1,07	Efisien	-
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	126%	99,90	1,26	Efisien	-
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	98%	83,20	1.18	Efisien	-

- a. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Prasarana Transportasi tingkat efisiensinya adalah 1,01 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (99,19%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori *EFISIEN*;
- b. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang adalah 1,07 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (93%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (87,16%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori *EFISIEN*;

- c. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat efisiensinya adalah 1,26 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (126%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (99,90%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori *EFISIEN*;
- d. Pada Indikator Kinerja Utama Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan tingkat efisiensinya adalah 1.18 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (98%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (83,20%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori *EFISIEN*;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E/Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau (8.09.A/2024);
- 4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).
- Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 17 Seri D);

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kota Dumai dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D) dan dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang berhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

- Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- 4. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- 5. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
- 6. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai terdiri dari :

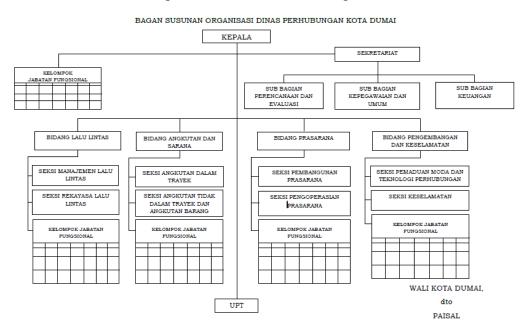
- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) subbagian yakni :
 - 2.1 Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2.2 Subbagian Keuangan; dan
 - 2.3 Subbagian Kepegawaian dan Umum
- 3. Bidang Lalu Lintas, membawahi:
 - 3.1 Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - 3.2 Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 3.3 Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Bidang Prasarana, membawahi:
 - 4.1 Seksi Pembangunan Prasarana
 - 4.2 Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - 4.3 Kelompok Jabatan Fungsional

- 5. Bidang Angkutan dan Sarana, membawahi:
 - 5.1 Seksi Angkutan Dalam Trayek;
 - 5.2 Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
- 6. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi:
 - 6.1 Seksi Keselamatan
 - 6.2 Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
 - 6.3 Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsinyanya, Dinas Perhubungan Kota Dumai didukung dengan adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagai berikut:

- 1. UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A, yang terdiri dari:
 - 1.1 Kepala UPT; dan
 - 1.2 Kasubbag Tata Usaha
- 2. UPT. Perparkiran, yang terdiri dari:
 - 2.1 Kepala UPT; dan
 - 2.2 Kasubbag Tata Usaha

Gambar I.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama Tahun 2024, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Perhubungan yang perlu ditangani sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya perencanaan di bidang perhubungan darat, laut dan udara;
- Tingginya pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan yang berdampak kepada keselamatan pengguna jalan;
- 3. Tingginya tingkat penggunaan angkutan pribadi dibandingkan angkutan umum;
- 4. Peningkatan volume lalu lintas di bandingkan kapasitas jalan yang tersedia;
- Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung konektivitas antar wilayah;
- 6. Belum tertatanya sistem perparkiran di tepi jalan umum;
- 7. Angkutan umum tergeser dengan adanya transportasi berbasis online yang semakin menjamur.

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Perhubungan Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Meningkatnya Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Meningkatnya Penerangan Jalan

Meningkatnya Penerangan Jalan

Meningkatnya Pelayanan Pengujian

Meningkatnya Pelayanan Pengujian

Meningkatnya Pelayanan Pengujian

Meningkatnya Pelayanan Pengujian

Meningkatnya Penerangan Jalan

Meningkatnya Penerangan Jalan

Meningkatnya Pengujian

Meningkatnya Pengu

Gambar I. 2
Cascading Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai

Sumber data: Penjenjangan Kinerja Dishub Kota Dumai, 2024

1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Perhubungan sebagaimana skema berikut:

Gambar I. 3 Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kota Dumai

PROS	SES BISNIS / Sasaran	SUB	PROSES BISNIS / Strategi	Peta Lintas Fungsi / Arah Kebijakan / Kegiatan (pilih "Arah Kebijakan" saja atau 3		
	1		2			
Kode	PROSES UTAMA	Kode		Kode		
HUB 01	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan	HUB 01.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	HUB 01.01.01	Melaksanakan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ serta Menetapkan Kebijakan dan Sosialisasi	
	Angkutan Jalan (LLAJ)		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	HUB 01.02.01	Menyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota seperti Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Penerangan Jalan, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan, Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat, dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan Luar Badan Jalan	
HUB 02	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	HUB 02.01	Melaksanakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	HUB 02.01.01	Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala, serta Penyediaan Bukti Lulus Uji Berkala	
		HUB 02.02	Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	HUB 02.02.01	Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang serta Pengamanan Angkutan selama Ramadhan, Lebaran, Natal dan Tahun Baru	
		HUB 02.03	Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	HUB 02.03.01	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Jalan Kabupaten/Kota	
HUB 03	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Perhubungan	HUB 03.01	Meningkatkan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Parkir Tepi Jalan Umum serta Pengujian Kendaraan Bermotor	HUB 03.01.01	Peningkatan Kapasitas SDM serta Sarana dan Prasarana Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Parkir Tepi Jalan Umum serta Pengujian Kendaraan Bermotor	

Sumber data: Peta Proses Bisnis Dishub Kota Dumai, 2024

1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1311.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Perhubungan Tahun 2023, telah disampikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel I.1
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Aksi/ Eviden
1.	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan lebih cermat dalam menyusun LKjIP khususnya terkait dengan pengungkapan seluruh informasi dan perbandingan capaian kinerja;	Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 mendatang, Dinas Perhubungan Kota Dumai akan lebih cermat dalam penyampaian narasi perbandingan capaian kinerja perangkat daerah, yakni perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu, perbandingan dengan target di level nasional (benchmark) serta penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.	Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023	15 Januari 2024	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Output Sudah Tercapai	https://drive.goog le.com/file/d/12N XTj0SuaghusS0 qcuUDjbhF5rTU OvT2/view?usp= sharing
2.	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi APIP atas hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	Dinas Perhubungan Kota Dumai telah menindaklanjuti rekomendasi APIP atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022	15 Januari 2024	Kasubbbag Perencanaan dan Evaluasi	Output Sudah Tercapai	https://drive.goog le.com/file/d/1_K CgCYsDIr8KYd2 TsPQzwd8LyA8v gmnm/view?usp =sharing

Sumber data : LHE dan Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE Dishub Kota Dumai, 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Dinas Perhubungan Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Perhubungan Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

"Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu"

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

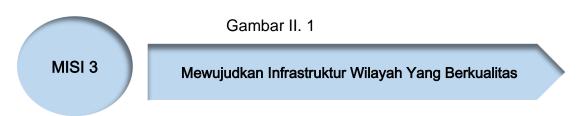
Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)".

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

- Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
- 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
- 3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
- 4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Perhubungan Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Perhubungan Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Perhubungan Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II. 1
Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran
Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026

	IKU WALIKOTA		IKU DINAS PERHUBUNGAN			
Tujuan RPJMD	Sasaran Rens		Sasaran Renstra	Indikator Renstra		
Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Indikator keberhasilan yaitu persentase tersedianya sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	 Persentase Prasarana Transportasi Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan 	

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Dumai dan Perubahan Renstra Dishub Tahun 2021-2026

2.3 Kebijakan, Strategi dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mwengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Perhubungan Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024

	/ISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)			
MISI KE 3 : N	lewujudkan Infrastruktur \	Wilayah yang Berkualitas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Indikator keberhasilan yaitu persentase tersedianya sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan, Pemeliharaan/Perbaikan, Peningkatan kualitas infrastruktur Bidang Perhubungan	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur bidang perhubungan	

Sumber data : Perubahan Renstra Dishub Kota Dumai 2021-2026

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II. 3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis			
	Uraian	Indikator Kinerja Utama		
		Persentase Prasarana Transportasi		
	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan 1 Indikator keberhasilan yaitu persentase penyediaan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang		
1		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		

Sumber data: Perubahan Renstra Dishub Kota Dumai 2021-2026

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 4
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Terselenggaranya Lalu	Persentase Prasarana Transportasi	67%
	Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Indikator keberhasilan yaitu persentase penyediaan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	68%
1		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	70%
	(LLAJ)	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km : 94.117 unit

Sumber data: Perjanjian Kinerja Dishub 2024

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 81.768.809.720,- (Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) untuk melaksanakan 2 (dua) Program Kerja antara lain :

Tabel II. 5 Program kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 26.302.695.476,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 55.466.114.244,-	APBD
	J UM L A H	Rp 81.768.809.720,-	APBD

Sumber data: DPA Murni Dishub Kota Dumai, 2024

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 6
Perubahan Program kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai

No.	Program		Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		32.402.368.156,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	78.044.230.244,-	APBD
J UM L A H			110.446.597.400,-	APBD

Sumber data : DPPA Dishub Kota Dumai, 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHBUNGAN KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres Nomor 29 Tahun 2014).

Dinas Perhubungan Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

 Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus :
$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

 Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

b. Rumus :
$$capaian = target - \frac{realisasi-target}{target} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu:

Tabel III. 2 Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Adribud	
No %		Keterangan Persentase	Atribut	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil	
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil	
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen Cukup Berhasil		
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen Tidak Berhasil		

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perhubungan Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Dinas Perhubungan Kota Dumai telah menetapkan (satu) Sasaran Strategis/Kinerja Utama dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2024. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai pada tahun 2024 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel III. 3 dan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III. 3 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2024

	TUJUAN/SASARAN		2023		2024			
o N	Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Cpaian Kinerja	Predikat Capaian
1.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	72%	124%	68.5%	77.5%	113%	Sangat Berhasil
2.	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	89%	146%	68%	63%	93%	Sangat Berhasil
3.		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km : 94.842 unit	95%	1.198,23 km : 94.117 unit	1.198,23 km : 96.069 unit	98%	Sangat Berhasil
4.		Persentase Prasarana Transportasi	56%	100%	67%	67%	100%	Sangat Berhasil
5.		Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	88%	147%	70%	88%	126%	Sangat Berhasil

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 68% realisasi sebesar 63% dengan capaian kinerja 93% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 89% atau tercapai sebesar 146% maka capaian tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 53%.

Nilai Anggaran 1.07% Nilai Anggaran Rp 293.715.966,00 Capaian 2024 93% Target 68% Realisasi 63%	Capaian 2024 Target	93% 68%
---	------------------------	------------

2. Indikator Persentase Prasarana Transportasi

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Prasarana Transportasi menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 67% realisasi sebesar 67% dengan tingkat capaian kinerja 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 56% atau tercapai sebesar 100% maka capaian tahun 2024 sama dengan capaian di tahun 2023 sebesar 100%.

Efisiensi Anggaran 1.01%
Nilai Anggaran Rp 8.926.893.897.31
Capaian 2024 100%
Target 67%
Realisasi 67%

3. Indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 70% realisasi sebesar 88% tercapai 126% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 88% atau tercapai sebesar 147% maka capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 21% namun tetap melebihi target yang ditetapkan.

Efisiensi Anggaran
Nilai Anggaran
Capaian 2024
Target
Realisasi
1.26%
Rp 15.585.620.834,47
126%
70%
88%

4. Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Capaian kinerja untuk indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan, target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 1.198,23 km : 94.117 unit dan realisasi sebesar 1.198,23 km : 96.069 unit dengan tingkat capaian 98% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 1.198,23 km : 94.842 unit atau tercapai sebesar 95% maka capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3%.

Efisiensi Anggaran Nilai Anggaran Capaian 2024 Target Realisasi 1.18% Rp 963.388.500,00 98% 1.198,23 km : 94.117 unit

1.198,23 km : 96.069 unit

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 denganTahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

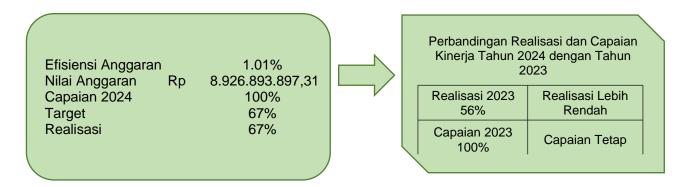
Tabel III. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

				Target			Realisas	i	Capaian			
No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1.	Tujuan : Meningkatkan Pelayanan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	51,5%	58%	68,5%	52%	51,5%	77,5%	101%	89%	113%	
2.	Infrastruktur Bidang Perhubungan	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	60%	-	-	42%	-	-	70%	-	-	
3.	Sasaran: Terselenggaranya Lalu	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	56%	-	-	55%	-	-	98%	-	-	
4.	Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pembangunan Prasarana Jalan	48%	-	-	48%	-	-	100%	-	-	
5.		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	50%	-	-	0.067	-	-	-	-	-	
6.		Persentase Prasarana Transportasi	-	56%	67%	-	56%	67%	1	100%	100%	
7.		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum dan Barang	-	61%	68%	-	89%	63%	-	146%	93%	
8.		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	60%	70%	ı	88%	88%	ı	147%	126%	
9.		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1	1.198,23 km : 90.081 unit	.198,23 km : 94.117 unit	1	1.198,23 km : 94.842 unit	.198,23 km : 96.069 unit	ı	95%	98%	

Sumber data : Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023

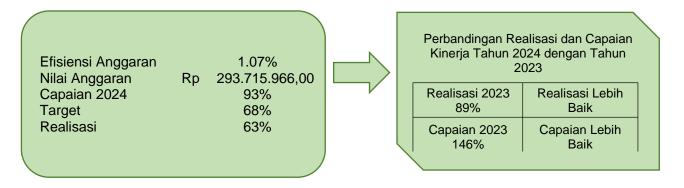
Dari perbandingan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Indikator pertama adalah *Persentase Prasarana Transportasi* dengan target pada tahun 2022 adalah 60% berasal dari perhitungan Jumlah prasarana transportasi pada tahun n dibagi jumlah prasarana yang seharusnya tersedia dikali 100%. Pada tahun 2022, jumlah sarana dan prasarana perhubungan sebanyak 42 unit dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang seharusnya tersedia sebanyak 70 unit. Realisasi pada tahun 2022 adalah 60% dengan capaian 100%.
 - b. Pada tahun 2023, jumlah prasarana transportasi pada tahun 2023 sebanyak 5 unit dengan target jumlah prasarana yang seharusnya tersedia sebanyak 9 unit. Realisasi pada tahun 2023 adalah 56% dengan capaian 100%.
 - c. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 67% dan realisasinya adalah 67% dengan rincian jumlah prasarana transportasi bertambah menjadi 6 unit (Pos Retribusi Pembantu Syech Umar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto) berbanding jumlah prasarana yang seharusnya tersedia sebanyak 9 unit sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.



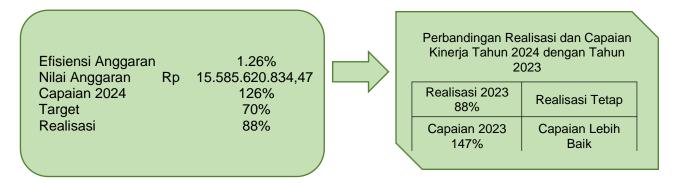
2. a. Indikator Kedua adalah Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang dengan target pada tahun 2022 adalah 60% berasal dari perhitungan Jumlah angkutan umum yang memiliki kir pada tahun n dibagi jumlah angkutan umum pada tahun n dikali 100%. Pada tahun 2022, jumlah angkutan umum yang memiliki kir sebanyak 124 unit dengan jumlah angkutan umum pada tahun n sebanyak 297 unit. Realisasi pada tahun 2022 adalah 42% dengan capaian 70%.

- b. Pada tahun 2023, Jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki Kir sebanyak 3.664 unit dan Jumlah angkutan umum dan barang yang wajib uji di sebanyak 4.121 capaian kinerja 146%.
- c. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 68% dan realisasinya adalah 63% dengan rincian Jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki Kir Tahun 2024 sebanyak 2.310 unit dan Jumlah angkutan umum dan barang yang wajib uji di Tahun 2024 sebanyak 3.647 unit sehingga capaian kinerjanya sebesar 93%. Tidak tercapaianya target kinerja 100% dikarenakan kesadaran para pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor atau uji kir secara berkala sedang menurun, dan hal tersebut sangat disayangkan mengingat pengujian kendaraan bermotor sangat penting guna memastikan kendaraan yang digunakan dijalan benar-benar laik jalan dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.



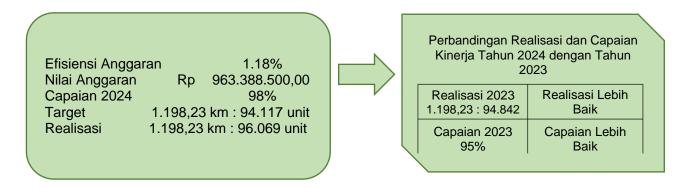
3. a. Indikator Ketiga adalah Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berasal dari perhitungan Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia pada tahun n dibagi Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia dikali 100%. Pada tahun 2022, indikator persentase penyediaan perlengkapan jalan, jumlah perlengkapan jalan yang dilaksanakan di tahun 2022 yakni pengadaan penerangan jalan umum terealisasi 883 unit lampu dari target 800 unit lampu dengan persentase 110%, pembangunan pendestrian sepanjang 198 m dari target 2.116,20 meter dengan persentase 9% dan penyediaan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas terealisasi 316 unit dari target 700 unit dengan persentase 45%, sehingga total keseluruhan indikator ini yakni 164% dengan rata-rata capaian pada tahun 2022 sebesar 55%.

- b. Pada tahun 2023, kedua Indikator (persentase pembangunan prasana jalan dan persentase penyediaan lalu lintas dan angkutan jalan) dirubah dan digabungkan menjadi 1 (satu) indikator yaitu persentase penyediaan lalu lintas dan angkutan jalan, target kinerja naik menjadi 60% dan realisasinya adalah 88% dengan rincian perlengkapan jalan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 yakni Pengadaan Rambu Lalu Lintas sebanyak 216 unit dari target 86 unit, Alat Penerangan Jalan sebanyak 991 unit dari target 800 unit, Marka Jalan di 8 lokasi dari target 15 lokasi, Alat pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebanyak 506 unit dari target 500 unit. Sehingga jika dirata-ratakan seluruh pengadaan perlengkapan jalan di Tahun 2023 sebesar 88% dari target yang ditetapkan sebesar 60% dengan tingkat capaian 147%.
- c. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 70% dan realisasinya adalah 88% dengan rincian pengadaan alat penerangan jalan serta rambu-rambu lalu lintas dan alat keselamatan lalu lintas lainnya yang tersebar di Kota Dumai jika dirata-ratakan seluruhnya sebanyak 88%sehingga capaian kinerjanya sebesar 126%.



4. a. Indikator Keempat adalah Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan berasal dari perhitungan Jumlah kendaraan dibagi panjang jalan. panjang jalan di Kota Dumai sepanjang 1.198,23 km dan jumlah kendaraan di Kota Dumai sebanyak 85.413 unit dengan rincian: Mobil Penumpang 17.405 unit, Bus 137 unit, Truck 6.636 unit dan Sepeda Motor 61.235 unit. Dengan formulasi perhitungan jumlah kendaraan dibagi panjang jalan sehingga realisasi pada tahun 2022 adalah 67,21 unit/km.

- b. Pada tahun 2023, formulasi yang digunakan untuk menghitung indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Sehingga bila menggunakan formulasi saat ini, untuk tahun 2022 capaian indikatornya sebesar 94% sedangkan di tahun 2023 tingkat capaiannya 95% artinya terjadi peningkatan 1% hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah kendaraan di Kota Dumai sebanyak 9.429 unit bila dibandingan dengan tahun lalu. Pada Tahun 2023, Panjang jalan di Kota Dumai sepanjang 1.198,23 km dibanding jumlah kendaraan di Kota Dumai sebanyak 94.842 unit, dengan target 1.198,23 km : 90.081 unit dengan tingkat capaian indikator sebesar 95%
- c. Pada tahun 2024 target kinerja menjadi 1.198,23km : 94.117unit dan realisasinya adalah 1.198,23km : 96.069unit dengan rincian jumlah kendaraan pada tahun 2024 yakni mobil penumpang 20.109 unit, bus 142 unit, truck 7.253 unit, sepeda motor 68.565 unit, sehingga capaian kinerjanya sebesar 98%.



3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel III. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

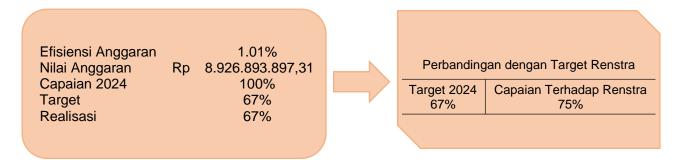
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
	Tujuan: Meningkatkan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	68,5%	77,5%	113%
	Pelayanan Infrastruktur Bidang	Persentase Prasarana Transportasi	89%	67%	75%
1	Perhubungan Sasaran: Terselenggara nya Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	82%	63%	77%
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	80%	88%	110%
	Jalan (LLAJ)	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km: 102.873 unit	1.198,23 km: 96.069 unit	93%

Sumber data : Dishub Kota Dumai Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan Periode Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu:

a. Indikator Persentase Prasarana Transportasi

Pada perencanaan lima tahunan, capaian indikator Persentase Prasarana Transportasi tahun 2024 kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 22 poin dari target Renstra sebesar 89% dan terealisasi 67% pada tahun 2024.



b. Indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang

Pada perencanaan lima tahunan, capaian indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang tahun 2024 kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 19 poin dari target Renstra sebesar 82% dan terealisasi 63% pada tahun 2024.



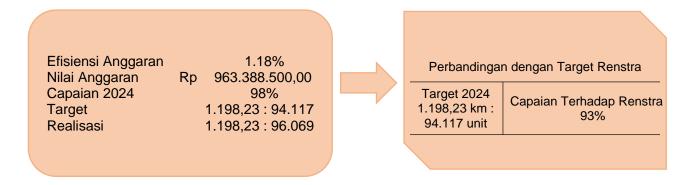
c. Indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pada perencanaan lima tahunan, capaian indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2024 melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 8 poin dari target Renstra sebesar 80% dan terealisasi 88% pada tahun 2024.



d. Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Pada perencanaan lima tahunan, capaian indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan tahun 2024 melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 6804 poin dari target Renstra sebesar 1.198,23 km : 94.117 unit dan terealisasi 1.198,23 km : 96.069 % pada tahun 2024.



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel III. 6 berikut :

Tabel III. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
	Tujuan:	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi	77.5%	-	
	Meningkatkan Pelayanan	Persentase Prasarana Transportasi	67%	-	
1	Infrastruktur Bidang Perhubungan Sasaran:	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	63%	-	Tidak Ada Target Nasional yang berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	88%	-	Perhubungan Kota Dumai
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km: 96.069 unit	-	

Sumber data: Dishub Kota Dumai Tahun 2024

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

1. Indikator Persentase Prasarana Transportasi

- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Prasarana Transportasi menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 67% realisasi sebesar 67%, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 56% atau tercapai sebesar 56%, maka capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023.
- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Prasarana Transportasi sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam menetapkan target telah memperhitungkan kondisi eksisting prasarana perhubungan yang ada dan kebutuhan prasarana yang akan datang sehingga dalam penetapan targetnya sesuai dengan perencanaan;

- Kota Dumai telah memiliki prasarana transportasi darat, laut dan udara yang sangat membantu konektivitas antar wilayah bagi masyarakat pengguna jasa di bidang perhubungan.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Prasarana Transportasi adalah sebagai berikut:
 - Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan/pembangunan prasarana transportasi, seperti contohnya Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang merupakan simpul transportasi perkotaan yang sampai saat ini Kota Dumai belum memilikinya dan pembangunan dermaga pelabuhan pengumpan lokal di Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan serta pengelolaan perkeretaapian yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
 - Prasarana Transportasi yang ada di Kota Dumai didominasi kewenangan
 Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Kementerian Perhubungan.
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Prasarana Transportasi adalah sebagai berikut:
 - Kedepannya Dinas Perhubungan Kota Dumai akan berupaya memberikan pelayanan terbaik di bidang perhubungan khususnya terkait transportasi di Kota Dumai dengan menata kembali trayek perkotaan dengan membangun Terminal Penumpang Tipe C sebagai simpul transportasi perkotaan;
 - Meningkatkan aksesibilitas dengan membangun dermaga pelabuhan pengumpan lokal di Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan yang direncanakan pada Tahun 2026.

2. Indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang

a. Capaian Kinerja untuk indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 68% realisasi sebesar 63%, tercapai 93% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 89% atau tercapai sebesar 146%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 53%.

- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang adalah sebagai berikut:
 - Dinas Perhubungan Kota Dumai melalui UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor terus berbenah dalam memberikan pelayanan pengujian yang maksimal kepada masyarakat dengan terus mengupgrade Alat Uji, meningkatkan kapasitas SDM Penguji, membangun bengkel dan lorong uji, ruang tunggu yang nyaman, dan telah membangun aplikasi alat uji UPT. PKB, serta yang terbaru bahwa tidak ada pungutan atas retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor atau segala kegiatan pengujian sudah tidak dikenakan biaya.
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang adalah sebagai berikut:
 - Kesadaran para pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor atau uji kir secara berkala sedang menurun;
 - Belum seluruh kendaraan wajib uji yang melakukan pengujian kendaraan bermotor;
 - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pengujian laik jalan kendaraan dan uji emisi gas buang kendaraan.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang adalah sebagai berikut:
 - Dinas Perhubungan Kota Dumai akan melaksanakan sosialisasi guna menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dan perusahaan angkutan umum dan barang untuk melaksanakan pengujian kendaraan demi menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan;
 - Bekerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan uji emisi gas buang kepada masyarakat di Kota Dumai.

3. Indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Capaian Kinerja untuk indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 70% realisasi sebesar 88%, tercapai 126% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 88% atau tercapai 147% maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 21%.

- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Komitmen Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mendukung Program
 Walikota Dumai Khidmat Penerangan
 - Sejak dilaunching nya Aplikasi SIM PJU (Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum) yang kemudian di upgrade menjadi Aplikasi Monitoring Integrasi Dishub Berbasis Android sehingga pengaduan dan keluhan dapat disampaikan oleh masyarakat bukan hanya terkait penerangan jalan namun seluruh permasalahan terkait perlengkapan jalan di Kota Dumai.
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:
 - Penerangan Jalan belum merata dirasakan seluruh masyarakat Kota Dumai dikarenakan keterbatasan anggaran bila dibandingan dengan usulan kebutuhan yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:
 - Kedepannya Dinas Perhubungan Kota Dumai akan berupaya mengakomodir usulan kebutuhan dari masyarakat dengan memaksimalkan anggaran yang ada demi mendukung program Khidmat Penerangan di Kota Dumai;
 - Melakukan rehabilitasi/pemeliharaan perlengkapan jalan yang ada di Kota Dumai.

4. Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

a. Capaian Kinerja untuk indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 1.198,23 km : 94.117 unit realisasi sebesar 1.198,23 km : 96.069 unit, tercapai 98% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 1.198,23 km : 94.842 unit atau tercapai sebesar 95% maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 3%.

- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan kurang dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang terdaftar di Kota Dumai pada tahun 2024 bila dibandingan dengan tahun lalu sebanyak 1.799 unit
 - Pertumbuhan jumlah kendaran yang paling banyak didominasi kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit.
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan adalah sebagai berikut:
 - Oldeal nya Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan, sehingga bila jumlah kendaraan terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dan kondisi ini dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama dibeberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan adalah sebagai berikut:
 - Peningkatan rasio jumlah kendaraan terhadap panjang jalan perlu dibarengi dengan kecepatan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik, sehingga dapat menurunkan dan/atau mengurangi risiko peningkatan angka kecelakaan dan kemacetan di jalan Kota Dumai.

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat paad tabel berikut:

Tabel III. 7
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan				68,5	77.5	Persen			
1.	Persentase Prasarana Transportasi				67	67	Persen			
2.	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	Terselengg aranya Lalu Lintas dan	Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan	Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan	68	63	Persen	78.044.230.244,-	54.514.195.421,38	69,85
3.	Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Angkutan Jalan (LLAJ)	darat yang layak	Angkutan Jalan (LLAJ	70	88	Persen			
4.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan				1.198,23 : 94.117	1.198,23: 96.069	Km / Unit			

Sumber data: SPJ Fungsional Dishub Tahun 2024

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat dilihat pada tabell berikut ini :

Tabel III. 8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
	Tujuan:	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	113%	99,55
	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang	Persentase Prasarana Transportasi	100%	99,19
1	Perhubungan Sasaran:	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	93%	87,16
	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	126%	99,90
	(LLAU)	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	98%	83,20

Sumber Data: SPJ Fungsional Dishub Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Prasarana Transportasi tingkat efisiensinya adalah 1,01 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (99,19%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori *EFISIEN*;
- b. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang adalah 1,07 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (93%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (87,16%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori *EFISIEN*;
- c. Pada Indikator Kinerja Utama **Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** tingkat efisiensinya adalah 1,26 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (126%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (99,90%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

d. Pada Indikator Kinerja Utama Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan tingkat efisiensinya adalah 1.18 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (98%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (83,20%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori *EFISIEN*;

Gambar III. 1 Dokumentasi Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2024













Gambar III. 2 Dokumentasi Peresmian Pos Retribusi Pembantu Syech Umar di Jalan Gatot Subroto, Kota Dumai



Gambar III. 3 Dokumentasi Pengadaan/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kota Dumai Tahun 2024











3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.9
Prestasi dan Penghargaan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
-	-	-	-	-

Sumber data: Dishub Kota Dumai Tahun 2024

B. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun anggaran per sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III. 10 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

			Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi
1			RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN AH KABUPATEN/KOTA	32,402,367,156.00	27,512,761,077.99
			tor Program: Persentase Penunjang Urusan rintahan Bidang Perhubungan		
	1		rencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja rangkat Daerah	48,480,000.00	48,158,000.00
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,480,000.00	22,158,000.00
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15,000,000.00	15,000,000.00
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,000,000.00	11,000,000.00
	2	Ad	lministrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,583,417,400.00	10,112,944,402.00
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,533,647,400.00	10,075,037,203.00
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,310,000	20,301,599.00
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29,460,000	17,605,600.00
	3	Ad	lministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87,748,000.00	86,891,406.00
		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	87,748,000.00	86,891,406.00
	4	Ad	lministrasi Umum Perangkat Daerah	1,685,459,700.00	1,588,611,019.00
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74,995,500.00	66,723,300.00
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210,949,100.00	197,151,100.00
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98,320,000.00	98,309,000.00
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	350,800,100.00	331,209,387.00
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	130,445,000.00	76,977,679.00
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	819,950,000.00	818,240,553.00
	5		ngadaan Barang Milik Daerah Penunjang usan Pemerintah Daerah	4,847,812,725.00	2,694,688,424.99
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
		2	Pengadaan Mebel	272,840,000.00	272,541,675.00
		3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	660,972,725.00	659,993,400.00
		4	Pengadaan Aset Tak Berwujud	100,000,000.00	99,971,040.00
		5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,664,000,000.00	512,182,309.99

	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,469,158,516.00	10,494,408,282.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,326,000.00	3,036,000.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	642,641,100.00	609,750,952.00
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10,823,191,416.00	9,881,621,330.00
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,665,290,815.00	2,472,059,544.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	782,370,000.00	743,707,273.00
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,242,314,375.00	1,189,427,550.00
		3 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	200,000,000.00	199,879,920.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	440,606,440.00	339,044,801.00
	8	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,000,000.00	15,000,000.00
		1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,000,000.00	15,000,000.00
2		ROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN NGKUTAN JALAN (LLAJ)	78,044,230,244.00	54,514,195,421.38
		dikator Program: Persentase Tersedianya asarana Perhubungan Darat yang Layak		
	1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	819,950,000.00	513,881,105.00
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	819,950,000.00	513,881,105.00
	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	71,750,878,800.00	49,192,545,884.53
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	23,067,800,000.00	12,210,213,341.80
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupate/Kota	21,282,669,800.00	15,107,645,945.73
		3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	747,000,000.00	649,937,680.00
		4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	26,653,409,000.00	21,224,748,917.00
	3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2,419,768,884.00	2,345,777,865.85
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas 1 Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik		621,937,548.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1,797,718,884.00	1,723,840,317.85
	4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	336,967,560.00	293,715,966.00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	120,000,000.00	94,838,325.00

	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	37,966,000.00	20,063,641.00
	3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	179,001,560.00	178,814,000.00
6		laksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu ntas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,157,878,000.00	963,388,500.00
	1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1,042,615,000.00	867,453,000.00
	2	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	77,940,000.00	76,237,000.00
	3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	37,323,000.00	19,698,500.00
7	An	nyediaan Angkutan Umum untuk Jasa ngkutan Orang dan/atau Barang antar Kota lam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,558,787,000.00	1,204,886,100.00
	1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1,558,787,000.00	1,204,886,100.00

Sumber data: SPJ Fungsional Dishub, 2024

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kota Dumai. LKIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 dengan kesesuaian Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, Dokumen RKPD tahun 2024, Capaian IKU Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja 2024 beserta perubahannya. Dalam laporan ini mengukur Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai yang terdiri atas 4 Kinerja Utama dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan hasil sebagai berikut:

- Indikator 1 Persentase Prasarana Transportasi dengan capaian 100% pada Tahun 2024 berasal dari perhitungan jumlah prasarana transportasi pada tahun n dibagi jumlah prasarana transportasi yang seharusnya tersedia dikali 100%. Dari target 67% bisa terealisasikan 67% dan termasuk kategori SANGAT BERHASIL.
- 2. Indikator 2 Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang dengan capaian 93% pada Tahun 2024 berasal dari perhitungan perhitungan jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki kir pada tahun n dibagi jumlah angkutan umum dan barang pada tahun n dikali 100%. Dari target 68% dapat terealisasikan 63% dan termasuk kategori SANGAT BERHASIL.
- 3. Indikator 3 Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan capaian 126% pada tahun 2024 berasal dari perhitungan jumlah perlengkapan jalan yang tersedian pada tahun n dibagi jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia dikali 100%. Dari target 70% dapat terealisasikan 88% dan termasuk kategori SANGAT BERHASIL.

 Indikator 4 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan dengan capaian 98% pada tahun 2024 berasal dari perhitungan panjang jalan dibagi jumlah kendaraan. Dari target 1.198,23 km: 94.117 unit dapat terealisasikan 1.198,23 km: 96.069 km dan termasuk kategori SANGAT BERHASIL.

B. LANGKAH PERBAIKAN / SARAN

- Dinas Perhubungan Kota Dumai telah merencanakan Pembangunan Prasarana Transportasi yang telah tertuang didalam dokumen Perubahan Rencana Strategis 2021-2026 yang diharapkan dapat terealisasi;
- 2. UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor agar lebih meningkatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor serta mensosialisasikan pentingnya pengujian dan memastikan kelaian jalan kendaraan bagi masyarakat pengguna jalan;
- 3. Memprioritaskan penyediaan perlengkapan jalan di daerah yang belum tersentuh infrastruktur perhubungan;
- 4. Memberikan saran dan masukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai terkait peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik haruslah sejalan dengan pertumbuhan kendaraan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKIP Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dumai, 9 Januari 2025 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

> SAID EFFENDI, SE., M.M. Pembina Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013

LAMPIRAN LKIP 2024

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

Visi

ː Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)

Misi

: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas

: Meningkatnya Infrastruktur Kota Sasaran

		Tujua															Sasaran			Cara I	lencapai Tujuan da	n Sasaran			
		Formula		ondi si wal			Target					Formula		ondi si wal			Target						Ket		
Uralan	Indikator	Perhitungan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Uraian	Indikator	Perhitungan	2021		2021		2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program	
Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana pada tahun n dibagi Jumlah sarana dan prasarana perhubungan	53.		60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	Terselengga ranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana pada tahun n dibagi Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang seharusnya tersedia dikali 100%	-	۵	60%		-	-		Penyediaan, Pemeliharaan/ Perbaikan, Peningkatan kualitas infrastruktur Bidang	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur bidang perhubungan;	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
		yang seharusnya tersedia dikali 100%									Persentase Prasarana Transportasi	Jumlah prasarana transportasi pada tahun n / Jumlah prasarana transportasi yang seharusnya tersedia x 100%	-	-	٠	56%	67%	78%	89%	Perhubungan					
											Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	Jumlah angkutan umum yang meniliki kir pada tahun n / jumlah angkutan umum pada tahun n dikali 100%		141	60%			-	-						
											Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	Jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki kir pada tahun n / Jumlah angkutan umum dan barang pada tahun n x 100%	-	*		61%	68%	75%	82%						
										-	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia pada tahun n / Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia x 100%			55	-			*						
											Persentase Pembangunan Prasarana Jalan	Jumlah presarana jalan yang dibangun pada tahun n J jumlah prasarana yang seharusnya dibangun x 100%	-	æ	48	-	-	t	*.						
											Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia pada tahun n / Jumlah perlengkapan jalan yang saharusnya tersedia x 100%	·	*		60%	70%	75%	80%						
											Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Jumlah kendaraan / panjang jalan	-	2	67%	-		۷	-						
											Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Panjang jalan . Jumlah kendaraan		~		1.198,23: 90.081	1.198,23: 94.117	1.198,23: 98,424	1,198.26	TON					

ubungan Kota Dumai

SAID EFFENU, SE., M.M.
Pémbina Tk. 1
NIP 19800201 200604 1 013

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
140.	Jasaran otrategis	ilidikator Killerja Sasaran	Satuan	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Persentase Prasarana Transportasi	%	67
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum dan Barang	%	68
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	70
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	km/unit	1.198,23 : 94.117

Dumai, Januari 2024

Pinak Pertama

SAID EFFENNI, SE

NIP 19800201 200604 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: SAID EFFENDI, SE

Jabatan

: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: H. PAISAL, SKM., MARS

Jabatan

: WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

WALIKOTA

H. PAISAL, SKM., MARS

Dumai, Januari 2024

AK PERTAMA

Pembina

NIP. 19800201 200604 1 013

No.	Carana Stratania	Ladillatas Minaria Sanana	Satuan	Target Tahunan
NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuari	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Persentase Prasarana Transportasi	%	67
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	%	68
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	70
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	km/unit	1.198,23 : 94.117

Sasaran

dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Terselenggaranya Lalu Lintas 1. Lintas dan Angkutan Jalan Rp.

55,466,114,244

(LLAJ)

Jumlah

Rp.

55,466,114,244



Januari 2024 Pertama FFENDI, SE Pempina NIP. 19800201 200604 1 013



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: ALIF SUJUD, S.Sos

Jabatan

: SEKRETARIS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: SAID EFFENDI, SE

Jabatan

: KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab *Pihak Pertama*

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

AN KEDIIA

Dumai, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

SAID EFFENDI, SE

Pembina

NIP 19800201 200604 1 013

ALIF SUJUD, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19790918 200112 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

: APBD TAHUN 2024

NO 1	TUJUAN 2	SASARAN 3		INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN		ANGGARAN
				4	5		6	7
	Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Perhubungan	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan	1.	Tersusunnya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000
			2.	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.447.869.720
			3.	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000
			4.	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.166.000
			5.	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.163.244.600
			6.	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.419.104.400
				7.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			8.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.030.856.440
JUMLAH ANGGARAN								

SAID EFFENDI, SE

Pembina NIP. 19800201 200604 1 013

SEKRETARIS,

ALIF SUJUD, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19790918 200112 1 004



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: NOPI YANTI, S.Sos

Jabatan

: KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: ALIF SUJUD, S.Sos

Jabatan

: SEKRETARIS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

HAK KEDUA

ALIF SUJUD, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19790918 200112 1 004

Dumai, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

NOPI YANTI, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19760521 200312 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

: APBD TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN 3		INDIKATOR KINERJA		TARGET	SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1	2				4	5		6	7
	Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Perhubungan		Dinas	1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.166.000
		Perhubungan		2.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.995.500
				3.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.979.100
				4.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.320.000
				5.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	175.000.000
				6.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000
				7.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	669.950.000
				8.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.326.000
				9.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	520.374.900
				10.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.607.753.416
JUMLAH ANGGARAN								12.349.864.916	

SEKRETARIS,

ALIF SUJUD, S.Sos Penata Tk. I NIP. 19790918 200112 1 004 KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM,

NOPI YANTI, S.Sos Penata Tk. I

NIP. 19760521 200312 2 003



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: TRI NANDA PUTRA, ST

Jabatan

: KASUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: ALIF SUJUD, S.Sos

Jabatan

: SEKRETARIS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukanserta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

ALIF SUJUD, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19790918 200112 1 004

Dumai, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

TRI NANDA PUTRA ST

Penata

NIP. 19870810 201001 1 015

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Tahun Anggaran

: APBD TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3		4	5		6	7
	Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Perhubungan	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan	1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.	Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	14.000.000
			2.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	15.000.000
			3.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.000.000
				JUMLAH ANGGARAN				40.000.000

SEKRETARIS,

ALIF SUDUD, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19790918 200112 1 004

KASUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI

TRI NANDA PUTRA, ST

Penata

NIP. 19870810 201001 1 015



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: H. SOLIKHUN, S.Sos

Jabatan

: KASUBBAG KEUANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: ALIF SUJUD, S.Sos

Jabatan

: SEKRETARIS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukanserta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Dumai, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

ALIE SILILID & SOE

PIHAK KEDUA

Penata Tk. I

NIP. 19790918 200112 1 004

H. SOLIKHUN, S.S.

Penata Tk. I

NIP. 19680107 199010 1 001

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

: APBD TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
1	2	3		4	5		6	7		
	Meningkatkan	Meningkatnya	1.	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	80 orang/bulan	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.403.859.720		
	Akuntabilitas Dinas Perhubungan	Akuntabilitas Dinas Perhubungan	2.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,310.000		
			3.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	2 Laporan	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.700.000		
			4.	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	4.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,150.000.000		
			5.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	101 Unit	5.	Pengadaan Mebel	162.840.000		
				6.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	67 Unit	6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206.264.400	
					7.	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	7.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.000.000
			8.	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000.000			
			9.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	36 Unit	9.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	716.250.000		
					10.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	171 Unit	10.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	800.000.000
			11.	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	11.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	200.000,000		
			12.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	314.606.440		
			13.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000		
	1			JUMLAH ANGGARAN			= =	13.912.830.560		

ALIF SUJUD, S.Sos Penata Tk. I

NIP. 19790918 200112 1 004

KASUBBAG KEUANGAN,

H. SOLIKHUN, S.Sos Penata Tk. I

NIP. 19680107 199010 1 001



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: JUMADI, S.Sos

Jabatan

: KEPALA BIDANG LALU LINTAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: SAID EFFENDI, SE

Jabatan

: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Dumai, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA

SAID EFFENDI, SE

Pembina

NIP. 19800201 200604 1 013

PIHAK PERTAMA

enata Tk. I

NIP. 19820503 200904 1 003

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

: TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Pelayanan Terselenggaranya	Terselenggaranya Lalu	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	95%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	13.710.069.800
	Infrastruktur Bidang Perhubungan	Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	22223	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	85.263.000
			JUMLAH ANGGARAN			13.795.332.800

KEPALA,

SAID EFFENDI, SE

NIP. 19800201 200604 1 013

KABID. LALU LINTAS,

Penata Tk. I NIP. 19820503 200904 1 003



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: ANTONI, S.Sos., M.Si

Jabatan

: KASI MANAJEMEN LALU LINTAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: JUMADI, S.Sos

Jabatan

: KEPALA BIDANG LALU LINTAS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Dumai, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Panata Tk I

NIP. 19820503 200904 1 003

ANTONI S.Sos., M.Si.

Penata Tk. I

NIP. 19771205 201001 1 003

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

: TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7		
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	47.940.000		
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabu paten/Kota	37.323.000		
	JUMLAH ANGGARAN							

KABID. LALU LINTAS,

JUMADI, S.Sos NIP. 19820503 200904 1 003 KASI MANAJEMEN LALU LINTAS,

ANTONI S.Sos., M.Si Penata Tk. I

NIP. 19771205 201001 1 003



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: FIRMAN, A.Md. LLAJ

Jabatan

: KASI REKAYASA LALU LINTAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: JUMADI, S.Sos

Jabatan

: KEPALA BIDANG LALU LINTAS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Dumai, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA

NIP. 19820503 200904 1 003

PIHAK PERTAMA

FIRMAN, A.Md. LLAJ

Penata Tk. I

NIP. 19691104 199403 1 003

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Tahun Anggaran

: TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1818 Unit	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	13.710.069.800	
	JUMLAH ANGGARAN						

KABID. LALU LINTAS,

Penata Tk. I

NIP. 19820503 200904 1 003

KASI REKAYASALALU LINTAS,

FIRMAN, A.Md. LLAJ

Penata Tk. I

NIP. 19691104 199403 1 003



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: CATUR HARGOWO, SE., M.Si

Jabatan

: JF. ANALIS KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: JUMADI, S.Sos

Jabatan

: KEPALA BIDANG LALU LINTAS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Dumai, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

NIP. 19820503 200904 1 003

CATUR HARGOWO, SE., M.Si NIP. 19751103 200501 1 012

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Tahun Anggaran

: TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Membantu Pelaksanaan Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabu paten/Kota	37.323.000
			JUMLAH ANGGARAN			37.323.000

KABID. LALU LINTAS,

NIP. 19820503 200904 1 003

JF. ANALIS KEBIJAKAN,

CATUR HARGOWO, SE., M.Si NIP. 19751103 200501 1 012



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: T. SUPRIANSAH, S.Sos., M.Si

Jabatan

: KEPALA BIDANG PRASARANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: SAID EFFENDI, SE

Jabatan

: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Dumai, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA

SAID EFFENDI. SE

Pembina

NIP. 19800201 200604 1 013

PIHAK PERTAMA

T. SUPRIANSAH, S.Sos., M.S

Penata

NIP. 19861005 201001 1 008



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: NURZAMAN EFFENDI, SH

Jabatan

: KASI PENGOPERASIAN PRASARANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: T. SUPRIANSAH, S.Sos., M.Si

Jabatan

: KEPALA BIDANG PRASARANA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Dumai, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA

T. SUPRIANSAH, S.Sos., M.Si

Penata

NIP. 19861005 201001 1 008

NURZAMAN EFFENDI, SH

Penata

NIP. 19800402 201408 1 002

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Tahun Anggaran

: TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	240 Unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	13.551.250.000
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Terselenggaranya Lalu	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 Unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	651.000.000
		uktur Bidang Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	481.800.000
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	179.001.560
	L		JUMLAH			14.863.051.560

KABID PRASARANA,

T. SUPRIANSAH, S.Sos., M.Si NIP. 19861005 201001 1 008 KASI PENGOPERASIAN PRASARANA

NURZAMAN EFFENDI, SH NIP. 19800402 2014081 002



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:TONY GUNAWAN, A.Md

Jabatan

: KASI PEMBANGUNAN PRASARANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: T. SUPRIANSAH, S.Sos., M.Si

Jabatan

: KEPALA BIDANG PRASARANA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

T. SUPRIANSAH, S.Sos., M.Si

Penata

NIP. 19861005 201001 1 008

Dumai, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

ONY GUNAWAN, A.Md

Penata

NIP. 19770831 200604 1 003

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

: TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	22.781.950.000		
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.350.668.884		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	2 Unit	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	95.000.000		
	JUMLAH							

KABID. PRASARANA,

T. SUPRIAMSAH, S.Sos., M.Si

Penata

NIP. 19861005 201001 1 008

KASI PEMBANGUNAN PRASARANA,

TONY GUNAWAN, A.Md

Penata

NIP. 19770831 200604 1 003



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: MEGA AYUNDA, ST

Jabatan

: ANALIS KEBIJAKAN MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: T. SUPRIANSAH, S.Sos., M.Si

Jabatan

: KEPALA BIDANG PRASARANA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Dumai, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

NIP. 19861005 201001 1 008

MEGA AYUNDA, ST NIP. 198209022011022001

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Tahun Anggaran

: TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7		
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	600.000.000		
	JUMLAH							

KABID PRASARANA,

T. SUPRIANSAH, S.Sos., M.Si NIP. 19861005 201001 1 008

ANALIS KEBIJAKAN MUDA

MEGA AYUNDA, ST NIP. 198209022011022001



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: FAISAL ARDYAN, ST

Jabatan

: KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: SAID EFFENDI, SE

Jabatan

: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Dumai, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

SAID EFFENDI, SE

KEDUA

Pembina

NIP. 19800201 200604 1 013

FAISAL ARDYAN, ST

Penata

NIP. 19840204 200701 1 001

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

: TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	95%	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	37.966.000	
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	95%	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.454.570.000	
	JUMLAH						

SAID EFFENDI, SE

Pempina NIP. 19800201 200604 1 013 KABID. ANGKUTAN DAN SARANA

FAISAL ARDYAN, ST

NIP. 19840204 200701 1 001



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: DIMPOS MANAEK, S, SE

Jabatan

: KASI ANGKUTAN DALAM TRAYEK DAN ANGKUTAN BARANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: FAISAL ARDYAN, ST

Jabatan

: KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

FAISAL ARDYAN, ST

Penata

NIP. 19840204 200701 1 001

Dumai, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

DIMPOS MANAEK. S, SE

Penata

NIP. 19860509 201001 1 002

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Tahun Anggaran

: TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7		
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1.454.570.000		
	JUMLAH							

KABID. ANGKUTAN DAN SARANA

FAISAL ARDYAN, ST

Penata

NIP. 19840204 200701 1 001

KASI ANGKUTAN DALAM TRAYEK DAN ANGKUTAN BARANG

DIMPOS MANAEK. S, SE

Penata

NIP. 19860509 201001 1 002



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: RIKKY ANDESMA, ST

Jabatan

: KEPALA UPT. PERPARKIRAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: SAID EFFENDI, SE

Jabatan

: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

SAID EFFENDI, SE

NIP. 19800201 200604 1 013

Dumai, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

RIKKY ANDESMA, ST

Penata Tk. I

NIP. 19831230 201001 1 014

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Tahun Anggaran

: TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
				1 Tahun	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000
	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan		Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPT. Perparkiran	1 Tahun	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	75.000.000
				1 Tahun	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	35.000.000.000
			JUMLAH ANGGARAN			37.075.000.000

KEPALA,

SAID EFRENDI, SE

Pembina NIP. 19800201 200604 1 013 KEPALA UPT. PERPARKIRAN,

MINN

RIKKY ANDESMA, ST

Penata Tk I

NIP. 19831230 201001 1 014



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: JERRY BUNGSU, S.Kom

Jabatan

: KASUBBAG TATA USAHA UPT. PERPARKIRAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: RIKKY ANDESMA, ST

Jabatan

: KEPALA UPT. PERPARKIRAN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

AK KEDUA

Dumai, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

RIKKY ANDESMA, ST

Penata Tk. I

NIP. 19831230 201001 1 014

JERRY BUNGSU, S.Kom

Penata Muda Tk. I

NIP. 19830730 200801 1 005

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Tahun Anggaran

: TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	7 2.000.000.000	
1	2	3	4	5	6		
				1 Tahun	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan			1 Tahun	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	75.000.000	
				1 Tahun	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	35.000.000.000	
	JUMLAH ANGGARAN						

KEPALA UPT. PERPARKIRAN,

RIKKY ANDESMA, ST

Penata Tk. I

NIP. 19831230 201001 1 014

KASUBBAG TATA USAHA UPT. P≰RPARKIRAN

JERRY BUNGSU, S.Kom

Penata Muda Tk. I

NIP. 19830730 200801 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: SAID EFFENDI, SE

Jabatan

: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: H. PAISAL, SKM., MARS

Jabatan

: WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PINAK REDUA WALIKOTA H. PAISAL, SKM., MARS Dumai, September 2024

PERTAMA

PALA

Pembina Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinaria Sagaran	Satuan	Target Tahunan
IVO.	Jasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Persentase Prasarana Transportasi	%	67
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	%	68
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	70
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	km/unit	1.198,23 : 94.117

Sasaran

Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rp. (LLAJ)

78,044,230,244

Jumlah

Rp.

78,044,230,244







Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: ALIF SUJUD, S.Sos

Jabatan

: SEKRETARIS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: SAID EFFENDI, SE., M.M.

Jabatan

: KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

HAK KEDUA

SAID EFFENDI, SE., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013

Dumai, September 2024

PIHAK PERTAMA

ALIF SUJUD, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19790918 200112 1 004

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

: APBD-P TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3		4	5		6	7
	Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Perhubungan	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan	1.	Tersusunnya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.482.000
			2.	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.226.654.728
			3.	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0
		- W - S	4.	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.748.000
			5.	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.759.453
			6.	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.466.115.490
			7.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.967.198.290
			8.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	806.754.989
				JUMLAH ANGGARAN				12.062.712.950

SAID EFFENDI, SE., M.M.

NIP. 19800201 200604 1 013

SEKRETARIS,

ALIF SUJUD, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19790918 200112 1 004



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: T. SUPRIANSAH, S.Sos., M.Si

Jabatan

: KEPALA BIDANG PRASARANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: SAID EFFENDI, SE., M.M.

Jabatan

: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Dumai,

September 2024

RIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SAID EFFENDI, SE., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013

T. SUPRIANSAH, S.Sos., M.Si

Penata Tk. I

NIP. 19861005 201001 1 008

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Tahun Anggaran

: APBD-P TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	
	Meningkatnya Pelayanan		Tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	95%	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	411.506.000	
	Infrastruktur Bidang Perhubungan	Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	95%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	21.665.777.347	
		à	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	95%	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	661.506.226	
			Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	95%	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	79.001.560	
	JUMLAH						

SAID EFFENDI, SE., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013

KABID. PRASARANA,

T. SUPRIANSAH, S.Sos., M.Si

Penata Tk. I

NIP. 19861005 201001 1 008



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: SURYANTO, S.Sos., M.A.P

Jabatan

: KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: SAID EFFENDI, SE., M.M.

Jabatan

: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab *Pihak Pertama*

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PINAK KEDUA

Dumai, September 2024

PIHAK PERTAMA

SAID EFFENDI, SE., M.M.

Pembira Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013

SURYANTO, S.Sos., M.A.P.

Pembina

NIP. 19720622 199303 1 003

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Tahun Anggaran

: APBD-P TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	SASARAN INDIKATOR KINERJA TA		KEGIATAN	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	95%	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	417.757.000	
			Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	95%	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17.902.359	
	JUMLAH						

KEPALA

SAID EFFENDI, SE., M.M.

NIP. 19800201 200604 1 013

KABID. PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN,

SURYANTO S.Sos., M.A.P

mbina

NIP. 1972/06/22 199303 1 003



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: JUMADI, S.Sos

Jabatan

: KEPALA BIDANG LALU LINTAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: SAID EFFENDI, SE., M.M.

Jabatan

: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Dumai,

September 2024

PIHAK KEDUA

SAID EFFENDI, SE., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013

JUMADI S Sos

PIHAK PERTAMA

Penata Tk. I

NIP. 19820503 200904 1 003

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Tahun Anggaran

: APBD-P TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7		
	Meningkatnya Pelayanan	Terselenggaranya Lalu	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	95%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.187.600.000		
	Infrastruktur Bidang Perhubungan	Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	95%	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	115.263.000		
	JUMLAH ANGGARAN							

KEPALA,

SAID EFFENDI, SE., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013

KABID. LALU LINTAS,

JUMADI, S.Sos Penata Tk. I

NIP. 19820503 200904 1 003



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: FAISAL ARDYAN, ST

Jabatan

: KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: SAID EFFENDI, SE., M.M.

Jabatan

: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Dumai,

September 2024

PIHAK KEDUA

SAID EFFENDI, SE., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013

FAISAL ARDYAN, ST

PIHAK PERTAMA

Penata

NIP. 19840204 200701 1 001

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Tahun Anggaran

: APBD-P TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN	
1	2 3		4	5	6	7	
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	95%	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	574.495.500	
	JUMLAH						

KEPALA

SAID EFFENDI, SE., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013

KABID. ANGKUTAN DAN SARANA

FAISAL ARDYAN, ST

Penata

NIP. 19840204 200701 1 001



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: RIKKY ANDESMA, ST

Jabatan

: KEPALA UPT. PERPARKIRAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: SAID EFFENDI, SE., M.M.

Jabatan

: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab *Pihak Pertama*

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

RIHAK KEDUA

SAID EFFENDI, SE., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013

Dumai, September 2024

PIHAK PERTAMA

RIKKY ANDESMA, ST

Penata Tk.

NIP. 19831230 201001 1 014

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Tahun Anggaran

: APBD-P TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7		
				1 Tahun	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000		
	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan		Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPT. Perparkiran	1 Tahun	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	75.000.000		
				1 Tahun	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	35.000.000.000		
	JUMLAH ANGGARAN							

KEPALA,

SAID EFFENDI, SE., M.M.

Pembina Tk. I NIP. 19800201 200604 1 013

KEPALA UPT. PERPARKIRAN,

RIKKY ANDESMA, ST

Penata Tk. I NIP. 19831230 201001 1 014



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: SAYED YOESMAR SYAHPUTRA, ST., M.Si

Jabatan

: KEPALA UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: SAID EFFENDI, SE., M.M.

Jabatan

: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Dumai, September 2024

PINAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SAID EFFENDI, SE., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013

SAYED YOESMAR SYAHPUTRA, ST., M.Si

Penata Tk. I

NIP. 19770301 201001 1 012

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Tahun Anggaran

: TAHUN 2024

NO	TUJUAN SASARAN		INDIKATOR KINERJ	A	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
1	2	3 4			5	6	7		
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Terslenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Pengujian Bermotor	Kendaraan	1 Tahun -				
	JUMLAH ANGGARAN								

KEPALA

SAID EFFENDI, SE., M.M. Pembina Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013

KEPALA. UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

SAYED YOESMAR SYAHPUTRA, ST., M.Si

Penata Tk. I NIP. 19770301 201001 1 012

PENGUKURAN KINERJA

Nama OPD

: Dinas Perhubungan Kota Dumai

Tahun Anggaran

: 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	Jumlah prasarana transportasi pada tahun n Jumlah prasarana transportasi yang seharusnya tersedia ^x 100%	67%	67%	100%
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	Jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki Kir pada tahun n Jumlah angkutan umum dan barang pada tahun n	68%	63%	93%
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia pada Tahun n Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia ^x 100%	70%	88%	126%
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Panjang Jalan : Jumlah Kendaraan	1.198,23 km : 94.117 unit	1.198,23 km : 96.069 unit	98%

Pagu Anggaran Program Tahun 2024

: Rp

78.044.230.244,00

Realisasi Anggaran Program Tahun 2024

: Rp

54.514.195.421,38

Persentase Capaian Program Tahun 2024

: Rp

69,85%

Dumai, 9 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

PembinaTk. I

NIP. 19800201 200604 1 013

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELANJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI TAHUN 2024

o Urusan Pemerintaha	OPD Pelaksana	Uralan Program/Keglatan/Sub Keglatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capalan Kinerja (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Perhubungan	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32,402,367,156.00	27,512,761,077.99	84.91		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1 Daerah	48,480,000.00	48,158,000.00	99.34		
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,480,000.00	22,158,000.00	98.57		
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		15,000,000.00	15,000,000.00	100.00		
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		11,000,000.00	100.00		
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,583,417,400.00	10,112,944,402.00	87.31		
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,533,647,400.00	10,075,037,203.00	87.35	Tunda Bayar atas Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir TA. 2024	Telah dibuat SPM untuk Pembayara kegiatan tersebut dan sedang di rev oleh inspektorat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,310,000	20,301,599.00	99.96		
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29,460,000	17,605,600.00	59.76	Tunda Bayar atas Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Telah dibuat SPM untuk Pembayara kegiatan tersebut dan sedang di rev oleh Inspektorat
		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87,748,000.00	86,891,406.00	99.02		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	87,748,000.00	86,891,406.00	99.02		
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,685,459,700.00	1,588,611,019.00	94.25		
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74,995,500.00	66,723,300.00	88.97	Tunda Bayar atas Belanja Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Telah dibuat SPM untuk Pembayara kegiatan tersebut dan sedang di rev oleh Inspektorat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210,949,100.00	197,151,100.00	93,46		
		3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98,320,000.00	98,309,000.00	99.99		
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	350,800,100.00	331,209,387.00	94.42		
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	130,445,000.00	76,977,679,00	59.01	Tunda Bayar atas Belanja Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Telah dibuat SPM untuk Pembayara kegiatan tersebut dan sedang di revi oleh inspektorat
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	819,950,000.00	818,240,553.00	99.79		
		5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,847,812,725.00	2,694,688,424.99	55.59		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	100.00		
		2 Pengadaan Mebel	272,840,000.00	272,541,675.00	99.89		4
		3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	660,972,725.00	659,993,400.00	99.85		
		4 Pengadaan Aset Tak Berwujud	100,000,000.00	99,971,040.00	99.97		
		5 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,664,000,000.00	512,182,309.99	19.23	Tunda Bayar atas Pembayaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Penambahan Ruangan Gedung Kantor Dishub, Fisik telah selesai dilaksanakan	Telah dibuat SPM untuk Pembayara kegiatan tersebut dan sedang di revi oleh Inspektorat
		6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,469,158,516.00	10,494,408,282.00	91.50		
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,326,000.00	3,036,000.00	91.28	Tunda Bayar atas Pembayaran Kegiatan	Telah dibuat SPM untuk Pembayara
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	642,641,100.00	609,750,952.00	94.88	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	kegiatan tersebut dan sedang di revi
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10,823,191,416.00	9,881,621,330.00	91.30	Pemerintahan Daerah	oleh Inspektorat
		7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,665,290,815.00	2,472,059,544.00	92.75		
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	782,370,000.00	743,707,273.00	95.06		
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,242,314,375.00	1,189,427,550.00	95.74		
		3 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	200,000,000.00	199,879,920.00	99.94		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Penmasalahan
			4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	440,606,440.00	339,044,801.00	76,95	Tunda Bayar atas Pembayaran Kegiatan Pemasangan Paving Blok Kantor Dinas Perhubungan	Telah dibuat SPM untuk Pembayaran kegiatan tersebut dan sedang di reviu oleh inspektorat
			8 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00		
			1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00		
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	78,044,230,244.00	54,514,195,421.38	69.85		
			1 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	819,950,000.00	513,881,105.00	62.67		
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ 1 Kabupaten/Kota	819,950,000.00	513,881,105.00	62.67	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang tidak jadi dilaksanakan sehingga penyusunan dokumen tidak jadi dilaksanakan dan adanya penyusunan dokumen pendahuluan sebelum dilakukan penyusunan dokumen pembangunan JPO tersebut.	Telah dibuat SPM untuk Pembayarar kegiatan tersebut dan sedang di reviu oleh inspektorat
			2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	71,750,878,800.00	49,192,545,884.53	68.56		
			1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	23,067,800,000.00	12,210,213,341.80	52.93	Secara keseluruh, kegiatan Fisik telah	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupate/Kota	21,282,669,800.00	15,107,645,945.73	70.99	selesai dilaksanakan tepat waktu, namun terdapat kendala realisasi keuangan	Telah dibuat SPM untuk Pembayaran
			3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	747,000,000.00	649,937,680.00	87.01	dikarenakan kondisi keuangan diakhir- tahun 2024 sehingga menyebabkan Tunda	 kegiatan tersebut dan sedang di reviu oleh inspektorat
			4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	26,653,409,000.00	21,224,748,917.00	79.63	Bayar seluruh kegiatan pada APBD Perubahan	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas	2,419,768,884.00	2,345,777,865.85	96.94		
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	622,050,000.00	621,937,548.00	99.98		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin 2 Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1,797,718,884.00	1,723,840,317.85	95.89	Tunda Bayar atas Kegiatan Pengawasan Parkir di Kota Dumai	Telah dibuat SPM untuk Pembayarar kegiatan tersebut dan sedang di revit oleh Inspektorat
			4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	336,967,560.00	293,715,966.00	87.16		
			1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	120,000,000.00	94,838,325.00	79,03	Tunda Bayar atas Pembayaran Kegiatan Pembuatan Kanopi Bengkel UPT, PKB	Telah dibuat SPM untuk Pembayarar kegiatan tersebut dan sedang di revio oleh inspektorat
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	37,966,000.00	20,063,641.00	52.85	Diklat Penguji untuk naik tingkat tidak bisa dilaksanakan bersamaan dalam 1 tahun anggaran yang sama sehingga harus dilaksanakan di tahun depan	Telah dibuat SPM untuk Pembayarar kegiatan tersebut dan sedang di reviu oleh Inspektorat
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	179,001,560.00	178,814,000.00	99.90		
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk 6 Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,157,878,000.00	963,388,500.00	83.20		
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1,042,615,000.00	867,453,000,00	83.20	Tunda Bayar atas Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Telah dibuat SPM untuk Pembayarar kegiatan tersebut dan sedang di reviu oleh Inspektorat
			2 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	77,940,000.00	76,237,000.00	97.81		
			3 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	37,323,000.00	19,698,500.00	52.78	Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang direncanakan 6 kali rapat, ternyata hanya dilaksanakan sebanyak 3 kali	Telah dibuat SPM untuk Pembayarar kegiatan tersebut dan sedang di reviu oleh Inspektorat
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang 7 dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,558,787,000.00	1,204,886,100.00	77.30		
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum 1 untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1,558,787,000.00	1,204,886,100.00	77.30	Belanja Bantuan Sosial Ojek Online dan Ojek Konvensional hanya dibayarkan sampai Bulan Oktober 2024 dikarenakan kondisi keuangan akhir tahun 2024 (Tunda Bayar)	Telah dibuat SPM untuk Pembayaran kegiatan tersebut dan sedang di reviu oleh Inspektorat